

# STRATEGI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nurul Jannah

NPP. 30.1021

*Asdaf Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: nuruljannah150300@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Sarwani, M.Ag

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Technological advances bring changes to the government system in Indonesia. The government in supporting organizational performance presents a policy to meet the needs of the community for public services with problems that often occur in the form of invalid data.. **Purpose:** In this study, the author aims to determine the strategy of the Office of Communication Information and Signage in developing an electronic-based government system in Hulu Sungai Utara Regency, South Kalimantan Province. **Method:** The research method used is descriptive qualitative method. The author's focus in this study is on the facts and phenomena that occur in events in the field which are then analyzed with the SWOT analysis theory so as to be able to answer questions that cause problems in the strategy of the Office of Information Communication and Coding in developing an electronic-based government system in Hulu Sungai Utara Regency. **Result:** The Office of Communication Information and Signage of Hulu Sungai Utara Regency took the first step in improving government services to develop an Electronic-Based Government System in Hulu Sungai Utara Regency. In its development, several applications have been made that support government services in Hulu Sungai Utara Regency. **Conclusion:** The conclusion of this study indicate that the strategy that must be carried out by the Office of Communication Informatics and Coding of Hulu Sugai Utara Regency is to utilize cooperation with regional devices to implement all applications to utilize the available network to inform policies to make a joint agreement regarding the budget plan by prioritizing the implementation of an Electronic-Based Government System by conducting training in collaboration with other regional devices to create applications that are integrated on one server and implement a legal basis (regulation) to manage data security.

**Keywords:** Strategy, SPBE, Office of Cummunication Information and Signage

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemajuan teknologi membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintah dalam mendukung kinerja organisasi menghadirkan sebuah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan permasalahan yang sering terjadi berupa tidak validnya data. **Tujuan:** Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Hulu

Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Fokus penulis dalam penelitian ini tertuju pada fakta-fakta serta fenomena yang terjadi pada peristiwa di lapangan yang kemudian dianalisis dengan teori analisis SWOT sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi penyebab suatu permasalahan dalam strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. **Hasil/Temuan:** Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara mengambil langkah awal melakukan peningkatan pada layanan pemerintah untuk mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam perkembangannya sudah dibuat beberapa aplikasi yang menunjang layanan pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang harus dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sugai Utara yaitu memanfaatkan kerja sama dengan perangkat daerah untuk menerapkan semua aplikasi memanfaatkan jaringan yang tersedia untuk menginformasikan kebijakan membuat kesepakatan bersama terkait rencana anggaran dengan mengutamakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengadakan pelatihan yang bekerja sama dengan perangkat daerah lain membuat aplikasi yang terintegrasi di satu server serta menerapkan dasar hukum (regulasi) untuk mengelola keamanan data. **Kata kunci:** Strategi, SPBE, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Memberikan dampak yang luar biasa terhadap pemerintahan dalam mendukung kinerja organisasi serta menghasilkan informasi dan data yang lebih akurat. Pemerintah dalam mendukung kinerja organisasi menghadirkan sebuah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan permasalahan yang sering terjadi berupa tidak validnya data. Dengan diterapkannya strategi tata kelola organisasi dan teknologi informasi.

Di era transformasi digital, pemerintah menemukan inovasi baru dalam mengelola organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melakukan percepatan transformasi digital dengan mengarahkan para Menteri untuk mencapai Digital Nation yang sehat. Upaya Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika mengarahkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, terkhusus Dinas Komunikasi Informatika agar mengambil langkah besar untuk mengurangi kesenjangan digital yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur tetapi juga meningkatkan internet antar wilayah dan provinsi.

Pemanfaatan teknologi informasi kemudian menjadi langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau yang disebut *good governance*. Salah satu langkah untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan meningkatkan kinerja dengan percepatan terhadap pencapaian pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut maka pemerintah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE yang merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam peraturan ini memiliki pengertian yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan publik. Pada pelaksanaannya SPBE dilandaskan dengan beberapa

prinsip yaitu efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018).

Pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik yang merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, mulai dicanangkan di masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi salah satu bagian yang menerapkan SPBE. Sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan SPBE di HSU. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mendukung terselenggaranya tata kelola SPBE yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan melaksanakan struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan terintegrasi.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Upaya tersebut meliputi penyediaan jaringan berupa program JARTAPLOK HSU dan pembuatan aplikasi serta website.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pengembangan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu dalam program penyediaan jaringan berupa JARTAPLOK HSU berdasarkan data dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa hanya ada 11 perangkat daerah yang terjangkau fasilitas sistem JARTAPLOK HSU dari seluruhnya 28 Badan/Dinas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Selain itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai pusat kendali atau teknis yang mengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menyediakan layanan pemerintahan dan layanan publik melalui website [www.hsu.go.id](http://www.hsu.go.id). Upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak berhenti dalam penyediaan website, tetapi juga membuat layanan yang mampu menghubungkan semua layanan publik dalam satu halaman internet yang bernama [portal.hsu.go.id](http://portal.hsu.go.id). Namun layanan publik pada [portal.hsu.go.id](http://portal.hsu.go.id) saat ini belum dapat digunakan. Hal ini merupakan permasalahan yang harus dibenahi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam rangka Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tidak hanya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara tetapi Perangkat Daerah juga ikut serta menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai saat ini ada sembilan belas Perangkat Daerah yang ada di kabupaten Hulu Sungai Utara yang sudah menggunakan aplikasi untuk memberikan layanan publik, terbanyak adalah aplikasi yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu aplikasi e-reggar, sipermon buk, laporan informasi keuangan, simjaga, eppgbm, pro kesga, sigizinet, prima, pwws imunisasi, siskohat, e-wars/skdr, surveilans ptm, siap, signap, e-logistik, e-monev katalog, e-watch, check bpom, simada, spm, aspak. Banyaknya aplikasi tersebut sayangnya masih dikelola secara lokal oleh dinas yang bersangkutan serta belum tertata dan terintegrasi dengan baik, sehingga aplikasi-aplikasi tersebut belum dapat di manfaatkan secara optimal oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Disamping itu aplikasi-aplikasi tersebut sebagian telah dibuat menggunakan jasa pihak ke III atau swasta yang dapat mengurangi keamanan data serta penyalahgunaan data bagi pihak yang tidak

berwenang, disampaikan dalam rancangan proyek oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu: Penelitian Maulina Sartika berjudul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Serdang Bedagai (Maulina Sartika, 2020), menemukan bahwa Perpres 95 Tahun 2018 dalam proses peningkatan jumlah layanan elektronik telah berhasil dilaksanakan, namun belum sepenuhnya dilaksanakan, karena tujuan yang ingin dicapai belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan. SPBE yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah mencapai standar sarana dan prasarana SPBE dan senantiasa bekerja dan memperbaharui aplikasi sesuai kebutuhan dalam pelayanan berdasarkan perangkat elektronik masing-masing individu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat, aplikasi yang menggunakan data. Dalam pelaksanaan SPBE menggunakan tenaga profesional yang mumpuni untuk melaksanakan SPBE dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Penelitian oleh Ulil Amri, Adiando, dan Hasim As'ari berjudul Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa Kota Dumai telah melakukan implementasi Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan baik. Tantangan yang dihadapi saat ini antara lain keterbatasan dana untuk pengembangan inovasi berbasis SPBE, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis TIK, dan integrasi sistem aplikasi yang belum lengkap (Ulil Amri, Adiando, Hasim As'ari, 2022). Penelitian Khaidar Mansyah dan Ridwan Saifuddin selanjutnya berjudul Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Lampung. Hasil yang ditemukan dalam penelitian yaitu implementasi SPBE masih relatif parsial (sektoral). Pemerintah daerah perlu mendengar masukan dan melibatkan para pemangku kepentingan. Desain kebijakan SPBE diharapkan mampu mengatasi kecenderungan ego kelembagaan dan kerja-sektoral yang masih umum terjadi (Khaidar Mansyah, Ridwan Saifuddin, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Erlina Silambi tentang Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Toraja Utara, ditemukan bahwa pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Toraja Utara Pada aspek efektivitas, belum berjalan dengan efektif. Pada aspek keterpaduan, belum berjalan dengan efektif. Pada aspek kesinambungan, belum berjalan dengan efektif. Pada aspek efisien, belum efektif. Pada aspek akuntabilitas, berjalan cukup efektif. Pada aspek interoperabilitas, sudah berjalan dengan efektif. Pada aspek keamanan, sudah berjalan cukup efektif (Erlina Silambi, 2020). Penelitian yang berjudul Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bekasi Tahun 2020 oleh Zhean Esa Anugrah dkk menemukan bahwa Kota Bekasi memperoleh Nilai Indeks SPBE sebesar 3.36 dan dikategorikan Baik. Terdapat beberapa aspek yang masih belum dioptimalkan yaitu pada Aspek Kebijakan Intenal Tata Kelola SPBE, Aspek Kelembagaan, Aspek Strategi dan Perencanaan, dan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga perlu ditingkatkan dan dilakukan perbaikan lebih lanjut. Hasil analisis SWOT yang dilakukan juga menunjukkan bahwa Kota Bekasi memiliki Kekuatan dan Peluang yang dapat mengungguli Kekurangan dan Ancaman yang ada, sehingga berdampak baik bagi kelanjutan pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi (Zhean dkk, 2022).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan yaitu pada lokus penelitian dimana penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan teori analisis SWOT dalam perumusan strategi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis desain penelitian kualitatif dengan hasil data akhir berupa deskriptif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini dalam berpikir ditekankan pada proses analisis induktif dan dikaitkan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diteliti dengan penggunaan logika yang ilmiah.. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni dengan menggunakan teori dari Rangkuti yang menyatakan bahwa Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini berdasar pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) (Rangkuti, 2017).

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan serta mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukungnya.

## **II. METODE**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis desain penelitian kualitatif dengan hasil data akhir berupa deskriptif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini dalam berpikir ditekankan pada proses analisis induktif dan dikaitkan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diteliti dengan penggunaan logika yang ilmiah. Sehingga penulis dapat memahami, mengobservasi dan mengeksplorasi makna yang terkandung pada fokus penelitian terkait pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif, analisis IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factors Analysis Summary*) serta analisis SWOT (*Strengths Weaknesses Opportunities Threats*).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesuai dengan visi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkaitan dengan tujuan umum dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, inovatif, dan akuntabel maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian membuat sebuah inovasi dengan teknologi untuk mengembangkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan membuat aplikasi dengan teknologi Single Sign On (SSO) yaitu Portal HSU. Dalam Portal HSU terdapat dua jenis layanan, yaitu Layanan Pemerintah dan Layanan Publik. Layanan pemerintah adalah kumpulan aplikasi layanan yang diperuntukkan untuk aparatur pemerintah dalam menunjang aktivitas kerja baik secara individu maupun dalam satuan organisasi perangkat daerah yang saling terintegrasi dengan basis data utama menggunakan data kependudukan dan kepegawaian. Sedangkan layanan publik adalah kumpulan layanan yang secara umum dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua masyarakat Hulu Sungai Utara dengan berbasis data

kependudukan (NIK) sehingga setiap masyarakat yang telah memiliki KTP dan kartu keluarga dapat memanfaatkan layanan ini dengan cara membuat akun pada Portal HSU.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara mengambil langkah awal melakukan peningkatan pada layanan pemerintah untuk mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam perkembangannya sudah dibuat beberapa aplikasi yang menunjang layanan pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Diantaranya yaitu SIPP, SIKON, SRIKANDI, Helpdesk HSU, dan lainnya.

### **3.1. Faktor Internal**

#### **3.1.1 Kekuatan (*Strength*)**

##### **a. Kesiapan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian**

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada September 2022 resmi meluncurkan tujuh aplikasi yang terintegrasi melalui Portal Satu Data HSU yang akan menunjang layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Aplikasi tersebut yaitu SIKon (Sistem Kepegawaian Online), SIPP (Sistem Informasi Presensi Pegawai), Kinerja ASN, Satu Data HSU, Helpdesk HSU, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), dan Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). (sumber: hsu.go.id).

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara mendukung adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik sejak diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dengan melakukan komitmen bersama menuju Kabupaten Hulu Sungai Utara Smart City sejak akhir tahun 2019.

##### **b. Adanya Dasar Hukum (Regulasi)**

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi pedoman dalam menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mampu menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara .

#### **3.1.2 Kelemahan (*Weakness*)**

##### **a. Keterbatasan Anggaran**

Anggaran yang didapatkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian khususnya di bidang E-Government dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menjalankan programnya terkait pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik jumlahnya jauh dari perencanaan. Sehingga keterbatasan anggaran ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

##### **b. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara jumlahnya masih kurang untuk pegawai yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **3.2. Faktor Eksternal**

#### **3.2.1 Peluang (*Oportunitie*)**

##### **a. Adanya Kerja Sama**

Dalam meningkatkan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melakukan kerja sama dengan beberapa perangkat daerah lainnya di lingkup pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara untuk terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi.

### b. Infrastruktur yang Memadai

Tersedianya jaringan tetap lokal atau yang disebut JARTAPLOK HSU yang merupakan infrastruktur internet yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat menghubungkan jaringan antar perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### 3.2.2 Ancaman (*Threats*)

#### a. Keamanan Data

Keamanan data yang rentan akan menjadi faktor penghambat dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penggunaan aplikasi yang bekerjasama dengan pihak luar rentan menyebabkan data diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka dari itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara menerapkan sistem Single Sign On (SSO) dengan penggunaan aplikasi berbasis website Satu Data HSU.

### 3.3 Strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penulis mengumpulkan fakta yang terjadi di lapangan berupa data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk dianalisis secara SWOT.

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p> <p><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>STRENGTHS (S)</b></p> <p>Kesiapan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang telah meluncurkan beberapa aplikasi dalam layanan pemerintahan</p> <p>Adanya dasar hukum (regulasi) penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	<p style="text-align: center;"><b>WEAKNESSES (W)</b></p> <p>Keterbatasan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran</p> <p>Sumber daya manusia yang masih kurang dengan kemampuan sesuai bidangnya</p>
	<p style="text-align: center;"><b>OPPORTUNITIES (O)</b></p> <p>Adanya kerja sama dengan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara</p> <p>Infrastruktur yang memadai dengan tersedianya menara jaringan di setiap titik kecamatan</p>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI S-O</b></p> <p>Memanfaatkan kerja sama dengan perangkat daerah untuk menerapkan semua aplikasi yang diluncurkan dalam layanan pemerintahan</p> <p>Memanfaatkan jaringan yang tersedia untuk menginformasikan kebijakan atau regulasi yang berlaku sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE</p>
<p style="text-align: center;"><b>THREATS (T)</b></p> <p>Keamanan data yang mudah diretas</p>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI S-T</b></p> <p>Membuat aplikasi yang terintegrasi di satu server oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Hulu Sungai Utara</p> <p>Menerapkan dasar hukum (regulasi) untuk mengelola keamanan data</p>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI W-T</b></p> <p>Memaksimalkan anggaran dan sumber daya manusia untuk menjaga keamanan data dalam penyelenggaraan SPBE</p>

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Strategi S-O

Pada strategi S-O bertujuan untuk menggunakan kekuatan dengan mengambil keuntungan peluang yang ada. Strateginya adalah memanfaatkan kerja sama dengan perangkat daerah untuk menerapkan

semua aplikasi yang diluncurkan dalam layanan pemerintahan dan memanfaatkan jaringan yang tersedia untuk menginformasikan kebijakan atau regulasi yang berlaku sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE.

## 2. Strategi W-O

Kolom strategi W-O adalah strategi memanfaatkan peluang dengan tujuan untuk mengatasi kelemahan. Berikut adalah strategi W-O yaitu membuat kesepakatan bersama terkait rencana anggaran dengan mengutamakan penyelenggaraan SPBE dan mengadakan pelatihan yang bekerja sama dengan perangkat daerah lain untuk meningkatkan kemampuan SDM.

## 3. Strategi S-T

Bertujuan untuk mengurangi sekaligus menghindari akibat dari ancaman dengan menggunakan kekuatan merupakan strategi S-T. Strategi S-T meliputi membuat aplikasi yang terintegrasi di satu server oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara serta menerapkan dasar hukum (regulasi) untuk mengelola keamanan data.

## 4. Strategi W-T

Strategi W-T adalah cara untuk bertahan dengan mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi W-T yaitu memaksimalkan anggaran dan sumber daya manusia untuk menjaga keamanan data dalam penyelenggaraan SPBE.

### **3.4 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Terhadap Strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Faktor penghambat dalam strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi: keterbatasan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran, sumber daya manusia yang masih kurang dengan kemampuan sesuai bidangnya, serta keamanan data yang mudah diretas.

Adapun faktor pendukung dalam strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut: kesiapan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang telah meluncurkan beberapa aplikasi dalam layanan pemerintahan, adanya dasar hukum (regulasi) penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, adanya kerja sama dengan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta infrastruktur yang memadai dengan tersedianya menara jaringan di setiap titik kecamatan.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara sama halnya dengan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Serdang Bedagai didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, hal ini menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Tetapi perbedaan diantara kedua penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian untuk mengetahui langkah atau strategi yang tepat dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan teori analisis SWOT, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Maulina Sartika tahun 2020 membahas tentang efektivitas pelayanan Berbasis Elektronik di Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mana penulis melakukan penelitian dengan beberapa indikator yaitu adanya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan; adanya tindakan perealisasi sesuai dengan kebijakan yang dilakukan ; adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan; serta adanya prosedur dan mekanisme monitoring dalam melakukan monitoring web.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Strategi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara dirumuskan dengan cara analisis SWOT sehingga menghasilkan strategi yang dapat dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu: memanfaatkan kerja sama dengan perangkat daerah untuk menerapkan semua aplikasi yang diluncurkan dalam layanan pemerintahan; memanfaatkan jaringan yang tersedia untuk menginformasikan kebijakan atau regulasi yang berlaku sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; membuat kesepakatan bersama terkait rencana anggaran dengan mengutamakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; mengadakan pelatihan yang bekerja sama dengan perangkat daerah lain untuk meningkatkan kemampuan SDM; membuat aplikasi yang terintegrasi di satu server oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Hulu Sungai Utara; serta menerapkan dasar hukum (regulasi) untuk mengelola keamanan data, memaksimalkan anggaran dan sumber daya manusia untuk menjaga keamanan data dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam menjalankan strateginya memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran, sumber daya manusia yang masih kurang dengan kemampuan sesuai bidangnya, serta keamanan data yang mudah diretas. Faktor pendukung meliputi: kesiapan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah meluncurkan beberapa aplikasi dalam layanan pemerintahan, adanya dasar hukum (regulasi) penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, adanya kerja sama dengan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta infrastruktur yang memadai dengan tersedianya menara jaringan di setiap titik kecamatan.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Prastowo. 2016. Menguasai teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif :(bimbingan dan pelatihan lengkap serba guna. Yogyakarta: Diva Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amri, U. dkk, 2022. “Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai”, Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6.
- Bandur, A. 2016. Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis data dengan NVIVO 11 Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Bungin, B. (2007). Analisis data penelitian kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Diambil 15 September 2022, dari <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>

- Creswell, John W. 2016. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dye, T. R. 2012. *Understanding public policy (14th ed.)*. United States of America: Pearson.
- Dunn, W. N. 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. Retrieved from [http://93.174.95.29/main/2349000/9ee983cf936b7c3e48ba681b5c731aa6/William N. Dunn - Public Policy Analysis\\_ An Integrated Approach-Routledge %282017%29.pdf](http://93.174.95.29/main/2349000/9ee983cf936b7c3e48ba681b5c731aa6/William%20N.%20Dunn%20-%20Public%20Policy%20Analysis%20-%20An%20Integrated%20Approach-Routledge%20-%202017.pdf)
- Esterberg, K. G. 2002. *Qualitative methods in social*. New York: Mc Graw Hill.
- Esa, Z. dkk, 2022. *Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bekasi Tahun 2020*. Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan) Volume 2, Nomor 1, 2022.
- Gunawan, Imam. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hayat. 2017. *Manajemen Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Hamdi, M. 2014. *Kebijakan publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Nashir Budiman (Ed). Jakarta: Raja Grafindo.
- Jhon W. Creswell & Cheryl N Poth. 2017. *A Book Review: Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. In *Russian Journal of Sociology* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.13187/rjs.2017.1.30>
- Khaidarmansyah. dan Saifuddin, R. 2022. *“Optimalisasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Provinsi Lampung”*. *Jurnal Manajemen* Vol. 16
- Lesmana, A. 2021. *“Rancangan Proyek Perubahan: Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Penerapan Layanan Sistem Single Sign On (SSO) Untuk Mewujudkan Layanan Publik Yang Terintegrasi Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan”*. Amuntai: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Moleong. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2014. *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan publik : Formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rangkuti, F. 2017. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Simangunsong, F. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Silalahi, U. 2012. *Metode penelitian sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Silambi, E. 2020. *“Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Toraja Utara”*. Makassar: Poiteknik STIA LAN Makassar.
- Sartika, M. 2020. *“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Serdang Bedagai”*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Aipi Bandung.
- Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.